

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Fungsi kontrol partai persatuan pembangunan dalam mengawasi pelaksanaan program gerbang desa di kabupaten tasikmalaya”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fungsi kontrol partai persatuan pembangunan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program gerbang desa di Kabupaten Tasikmalaya salah satu cara mewujudkannya melalui pengawasan. Pengawasan adalah pengendalian dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan, pengelolaan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Teori yang digunakan untuk mengkajinya adalah partai politik, Fungsi kontrol dan kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengawasi pelaksanaan program gerbang desa, PPP melaksanakan fungsi kontrol melalui anggotanya di parlemen. Dalam mengawasi pelaksanaan program gerbang desa, PPP memanfaatkan 3 fungsi legislatif yaitu, legislasi, pengawasan dan anggaran. *Pertama*, Perencanaan yang disusun walaupun sudah melalui proses yang panjang yaitu dari musrenbang (kabupaten/provinsi) menunjukkan suatu kinerja yang jelas serta menunjukkan keterpaduan program bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan usulan dari desa sejak awal telah terelementasi. *Kedua*, Proses fungsi kontrol partai tidak berjalan serta tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik partai yang memiliki otoritas dan kekuasaan hanya menyampaikan fungsi dan kepentingan pribadinya. *Ketiga*, Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih menempatkan desa sebagai suatu objek klasifikasi rendah sehingga tidak mejadi prioritas terhadap suatu program. *Keempat*, ketidakjelasan kewenangan yang ada dari pemerintah Kabupaten menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun kebijakan terhadap upaya pembangunan desa. Apabila program gerbang desa berhasil akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan secara lokal sampai nasional, konsep gerbang desa yang dilakuan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan beraktivitas di desa keberhasilan ini tergantung kepada kemauan politik para pengambil kebijakan serta pengawasan partai politik.

Kata Kunci: Fungsi Kontrol, Partai Politik, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

This study is entitled "The control function of the unity development party in overseeing the implementation of the village gate program in the Tasikmalaya district". This research is motivated by the control function of the unity development party as part of the supervision of the implementation of the village gate program in Tasikmalaya District, one of the ways to realize it through supervision. Supervision is the control and examination of local government performance in implementation, management to improve local government performance. Theories used to study it are political parties, control functions and public policies. The method used in this study is a qualitative research method using a descriptive approach.

The results showed that in overseeing the implementation of the village gate program, PPP carried out the control function through its members in parliament. In overseeing the implementation of the village gate program, PPP utilizes 3 legislative functions namely, legislation, supervision and budget. First, the planning that was compiled even though it has been through a long process that is from the Musrenbang (district / province) shows a clear performance and shows the integration of the program even in most cases the planning proposal from the village has since been elaborated. Second, the process of party control functions does not run and does not accommodate the interests of the community well, parties that have authority and power only convey their personal functions and interests. Third, the perspective of all parties towards village development efforts still places the village as an object of low classification so that it does not become a priority for a program. Fourth, the lack of clarity of the existing authority of the district government causes various difficulties in developing policies towards village development efforts. If the successful village gate program will contribute to the success of development locally and nationally, the village gate concept that is carried out involves all stakeholders who will be active in this successful village depending on the political will of the policy makers and the supervision of political parties.

Keywords: Control Function, Political Parties, Public Policy.

